

ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT, DAN STRATEGI PROGRAM PAKINTA TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA MAKASSAR

Septian Fernandi¹, Erwin Horas², Rosida Maedina Agus³

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

1septianfernandijrpa@gmail.com, 2erwineho2009@gmail.com, 3rosidaypup@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the influence of taxpayer knowledge, community economic status, and the Pakinta program strategy on compliance with Land and Building Tax (PBB) payments in Makassar City. The population of registered Land and Building Tax (PBB) objects consists of 204,509 tax objects, and the sampling technique used is quota sampling with a sample of 65 taxpayer respondents in the city of Makassar using a questionnaire. The data analysis techniques used include validity testing, reliability testing, normality testing, multicollinearity testing, heteroskedasticity testing, and hypothesis testing. Based on the research findings, it partially shows that taxpayer awareness in Makassar City has a significance value (Sig) of 0.16 (<0.05), which means that awareness of paying land and building tax (PBB) has a positive effect. It also partially shows that taxpayer awareness in Makassar City has a significance value (Sig) of 0.03 (<0.05), indicating that awareness of paying property and building taxes (PBB) has a positive effect. The partial test shows that the Pakinta Program Strategy has a significance value (Sig) of 0.420 (<0.05), meaning that the Pakinta Program Strategy does not influence compliance with paying property and building taxes (PBB). Based on the simultaneous test, which yielded a significance value (Sig) of 0.000 (<0.05), it can be concluded that the three independent variables influence compliance with paying property and building taxes (PBB).

Keywords: Taxpayer Awareness, Economic Level of the Community, Pakinta Program, Compliance with Paying PBB

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi masyarakat, dan strategi program Pakinta terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar. Populasi objek pajak pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terdaftar sebanyak 204.509 objek pajak dan teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling dengan sampel 65 responden objek wajib pajak di Kota Makassar dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis. Berdasarkan temuan penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Makassar memiliki nilai signifikansi (Sig) senilai 0.16 (<0.05) yang artinya kesadaran terhadap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh positif, secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Makassar memiliki nilai signifikan (Sig) senilai 0.03 (<0.05) yang artinya kesadaran terhadap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh positif, dan Uji parsial menunjukkan bahwa Strategi Program Pakinta memiliki nilai signifikansi (Sig) senilai 0,420 (<0.05), yang artinya Strategi Program Pakinta tidak berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan uji secara simultan mendapatkan nilai sig 0,000 (< 0.05) maka dapat disimpulkan tiga variabel independen terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, Tingkat ekonomi Masyarakat, Program Pakinta, Kepatuhan membayar PBB

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah memerlukan dana yang sangat besar, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan utama yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan adalah pajak, yang merupakan pungutan wajib dari masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan langsung.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia. Sejak tahun 2011, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.07/2010, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 2010, tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, dimana kewenangan pemungutan PBB telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun, dalam implementasinya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp165.992.508.214 pada tahun 2020 menjadi Rp256.820.113.470 pada

tahun 2024, namun pencapaian target masih fluktuatif. Persentase pencapaian target mengalami penurunan dari 101,21% pada tahun 2020 menjadi 80,26% pada tahun 2024, dengan titik terendah pada tahun 2023 sebesar 73,60%.

Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Menurut Ariffin & Sitabuana (2022), wajib pajak dianggap patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Beberapa faktor diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pertama, kesadaran wajib pajak yang menurut Hasibuan (2022) masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), manfaat bagi masyarakat, dan sanksi yang dikenakan. Zaikin, Pagalung, & Rasyid (2022) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya.

Kedua, kondisi ekonomi keuangan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Ramdhani (2020) menjelaskan bahwa kondisi keuangan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, pembayaran pajak seringkali dianggap sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi karena prioritas utama mereka adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan sistem pembayaran online melalui aplikasi "PAKINTA" (Pajak Terintegrasi & Terdigitalisasi) yang dikembangkan oleh Bapenda Kota Makassar. Menurut Putri (2023) sistem pembayaran online memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pada penelitian ini dirancang menggunakan hubungan kausal, Hubungan kausal adalah hubungan sebab-akibat dimana perubahan pada variabel penyebab (independen) mengakibatkan perubahan pada variabel akibat (dependen)

secara sistematis dan dapat diprediksi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Populasi pada penelitian merupakan seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Bapenda Kota Makassar sebanyak 204.509 Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling, jumlah sampel yang digunakan 65 objek wajib pajak. Penelitian ini uji statistik digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji F (Uji Simultan), Uji T (Uji Parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 dengan menggunakan kuisisioner dengan sampel yang terkumpul sebanyak 65 responden dengan karakteristik umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan, berikut karakteristik dari responden:

Tabel 1. Umur

Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30 Tahun	30	46.2	46.2	47.7
31-40 Tahun	23	35.4	35.4	83.1
41-50 Tahun	7	10.8	10.8	93.8
51-60 Tahun	4	6.2	6.2	100.0
> 60 Tahun	1	1.5	1.5	1.5
Total	65	100.0	100.0	

Sumber: data primer diolah, 2025

Tabel 2. Pendidikan Terakhir

Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	9	13.8	13.8	98.5
SMP	1	1.5	1.5	100.0
D3	2	3.1	3.1	4.6
D4	4	6.2	6.2	10.8
S1	40	61.5	61.5	72.3
S2	7	10.8	10.8	83.1
S3	1	1.5	1.5	84.6
Total	65	100.0	100.0	

Sumber: data primer diolah, 2025

Tabel 3. Pekerjaan

Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Arsitek	2	3.1	3.1	4.6
guru	1	1.5	1.5	3.5
Ibu Rumah Tangga	3	4.6	4.6	9.2
konselor	1	1.5	1.5	10.8
Mahasiswa	17	26.2	26.2	36.9
Pegawai Swasta	19	29.2	29.2	66.2
Pensiunan	3	4.6	4.6	70.8
Petani/Nelayan	1	1.5	1.5	72.3
PNS/TNI/Polri	6	9.2	9.2	81.5
Psikolog	1	1.5	1.5	83.1
Wiraswasta/Pedagang	11	16.9	16.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,726	0.244	valid
	X1.2	0.718	0.244	valid
	X1.3	0.572	0.244	valid
	X1.4	0.596	0.244	valid
	X1.5	0.573	0.244	valid
Tingkat Ekonomi Masyarakat (X2)	X2.1	0.725	0.244	valid
	X2.2	0.738	0.244	valid
	X2.3	0.679	0.244	valid
	X2.4	0.638	0.244	valid
	X2.5	0.733	0.244	valid

Program Pakinta (X3)	X3.1	0.804	0.244	valid
	X3.2	0.769	0.244	valid
	X3.3	0.770	0.244	valid
	X3.4	0.765	0.244	valid
	X3.5	0.831	0.244	valid
Kepatuhan Membayar PBB(Y)	Y1	0.791	0.244	valid
	Y 2	0.741	0.244	valid
	Y 3	0.714	0.244	valid
	Y 4	0.794	0.244	valid
	Y 5	0.720	0.244	valid

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan uji validitas Tabel 4, variabel kesadaran wajib pajak (X1), tingkat ekonomi masyarakat (X2), program pakinta (X3), dan kepatuhan membayar PBB (Y) menyimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid dikarenakan Nilai Rhitung lebih besar Rtabel.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	0.637	Reliabel
Tingkat Ekonomi masyarakat (X2)	0.739	Reliabel
Program Pakinta (X3)	0.804	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran PBB (Y)	0.846	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Uji Reliabilitas Tabel 5, variabel kesadaran wajib pajak (X1) hasil cronbach bernilai 0,637 yang artinya nilai $0,637 > 0,600$, Tingkat ekonomi Masyarakat (X2) hasil cronbach bernilai 0,739 yang artinya nilai $0,739 > 0,600$, program Pakinta (X3) hasil cronbach bernilai 0,846 yang artinya nilai $0,846 > 0,600$, dan Kepatuhan membayar PBB (Y) hasil cronbach bernilai 0,804 yang artinya $0,804 > 0,600$, menyimpulkan bahwa semua variabel reliabel.

Tabel 6. Uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29152342
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.085
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data primer diolah, 2025

Pada tabel 6, uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-smirnov dengan jumlah signifikansi (sig) berjumlah 0.200 yang artinya $0.200 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut Normal.

Tabel 7. Uji multikolinealiritas

Variabel	Tolerance	Vif
Kesadaran Wajib pajak (X1)	0.884	1.131
tingkat ekonomi (X2)	0.759	1.318
strategi program Pakinta (X3)	0.724	1.382

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai tolerance $0.884 > 0.100$, dan nilai VIF $1.131 < 10.00$, variabel Tingkat Ekonomi (X2) memiliki nilai $0.759 > 0.100$ dan nilai VIF $1.318 < 10.00$, Strategi Program pakinta (X3) memiliki nilai $0.724 > 0.100$ dan nilai VIF $1.382 > 10.00$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala

Tabel 8. Uji Heteroskedas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.093	1.870		.585	.561
Kesadaran Wajib pajak	.141	.091	.204	1.547	.127

tingkat ekonomi	-.043	.078	-.078	-.547	.586
strategi program Pakinta	-.078	.063	-.180	-1.235	.222

Sumber: data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8. Variabel Kesadaran Wajib pajak (X1) nilai sig. 0.127 > 0.05, variabel Tingkat Ekonomi (X2) 0.586 > 0.05, variabel Strategi Program Pakinta (X3) 0.222 > 0.05. dari ketiga variabel independen semua nilai signifikan lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil analisis regresi linier berganda dan Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.636	2.896		1.256	.214
X1	.350	.141	.275	2.476	.016
X2	.378	.121	.377	3.138	.003
X3	.079	.098	.100	.812	.420

Sumber: data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 3,636 + 0.350 + 0.378 + 0.079$$

Nilai konstan yang didapat bernilai 3,636 maka dapat diartikan variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai 3,636. Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X1) didapat bernilai 0,350 maka dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan membayar PBB juga akan mengalami kenaikan sebesar $Y=0.350$. Nilai koefisien Tingkat Ekonomi (X2) didapat bernilai 0.378 maka dapat diartikan jika Tingkat ekonomi mengalami kenaikan maka kepatuhan membayar PBB juga akan mengalami kenaikan sebesar $Y=0.378$. Nilai koefisien Strategi Program Pakinta (X3) didapat bernilai 0.079 maka dapat diartikan jika Strategi Program Pakinta mengalami kenaikan maka variabel kepatuhan membayar PBB juga akan mengalami kenaikan sebesar $Y=0.079$.

Berdasarkan tabel 9, Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar $0,16 < 0,05$ dan nilai t hitung > t tabel sebesar $2,476 > 1,997$, yang menunjukkan pengaruh positif

terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Tingkat ekonomi (X2) mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0.03 < 0.05$ dan nilai Thitung $> T_{tabel}$ sebesar $3,318 > 1,997$ maka dapat disimpulkan variabel Tingkat ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Variabel strategi program pakinta (X3) mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0.420 > 0.05$ dan nilai Thitung $> T_{tabel}$ sebesar $0,812 > 1,997$ maka dapat disimpulkan variabel strategi program pakinta (X3) berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

Tabel 10. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	167.716	3	55.905	10.147	.000 ^b
Residual	336.069	61	5.509		
Total	503.785	64			

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10 hasil dari Uji simultan bernilai 0.000 yang artinya dalam pengujian parsial $0.000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat ekonomi (X2), variabel Strategi Program pakinta (X3) terhadap variabel Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan bangunan (Y) berpengaruh positif secara simultan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari Uji parsial menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Makassar memiliki nilai signifikansi (Sig) senilai $0.16 < 0.05$, yang artinya kesadaran terhadap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berpengaruh signifikan dan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Numberi, Akuntansi, Ekonomi, & Bisnis (2023) dan Dahlia dan Santosa (2024). Dalam hal ini kesadaran dalam pembayaran PBB di Kota Makassar sangat tinggi, karena dengan tingginya kesadaran pembayaran PBB dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. PAD berguna untuk membangun infrastruktur, mensejahterahkan Masyarakat Kota Makassar dalam hal fasilitas Kesehatan, pelayanan umum, Pendidikan, pelayanan administrasi.
2. Berdasarkan hasil dari Uji parsial menunjukan bahwa Tingkat Ekonomi masyarakat di Kota Makassar memiliki nilai signifikansi (Sig) senilai $0.03 < 0.05$, yang artinya Tingkat ekonomi Masyarakat Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dikemukakan oleh Apriani & Akbar (2025) dan Cahyani dan Sovita (2024) yang mengemukakan bahwa tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam hal ini jika seseorang mempunyai penghasilan yang tinggi dan kebutuhan kehidupan sehari-hari tercukupi, seseorang akan membayar kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Tingkat ekonomi yang tinggi maka seseorang lebih takut untuk mendapatkan sanksi dan denda dari tunggakan Pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga bunga dari tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dihindari.

Berdasarkan hasil dari Uji parsial menunjukkan bahwa Strategi Program Pakinta memiliki nilai signifikansi (Sig) senilai $0,420 > 0.05$, yang artinya Strategi Program Pakinta tidak berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini penelitian tidak sejalan yang dilakukan oleh Fausia (2025) yang mengemukakan bahwa pengaruh penggunaan digital payment terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif. Dalam hal ini faktor yang menjadi penggunaan program pakinta tidak signifikan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan daerah Kota Makassar. Walaupun Program pakinta tidak signifikan tetapi program pakinta merupakan terobosan dalam pembayaran Pajak Bumi dan bangunan karena bisa membayar Pajak bumi dan bangunan dimana saja tanpa harus ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sehingga memudahkan masyarakat yang terkendala kesibukan seseorang dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran warga Makassar dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Makassar sudah menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran ini dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. Selain itu, tingkat perekonomian masyarakat dalam membayar PBB menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan seseorang memungkinkan mereka untuk membayar PBB tanpa mengganggu kebutuhan pokok dan memiliki kemampuan finansial untuk membayar PBB. Meskipun hasil penelitian tidak menunjukkan dampak yang signifikan, strategi program Pakinta dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak memberikan dampak yang nyata terhadap PBB. Namun, program Pakinta memungkinkan kita untuk membayar pajak bumi dan bangunan di mana saja, dan kita dapat mengakses Pakinta melalui telepon pintar.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan dalam populasi dan sampel, pengambilan sampel yang hanya berjumlah 65 responden sehingga belum dapat merefleksikan

kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar. Oleh karena itu peneliti menyaranakan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan jumlah sampel, mengembangkan variabel lain, menerapkan metode-metode yang belum digunakan untuk menentukan kepatuhan pembayaran PBB di Kota Makassar.

REFERENSI

- Apriani, M., & Akbar, arya Z. (2025). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, (28), 523–534.
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.
- Dahlia, I., & Santosa, B. (2024). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KEL. SEPANJANG JAYA KOTA BEKASI)* Swadaya Institute Of Business and Communication Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Management , Swadaya Institute Of Business and Communication. Retrieved from <https://jurnal.swins.ac.id/index.php/cakrawala/index>
- Fausia, A. (2025). *Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pembayaran Pbb Di Desa Garing Kabupaten Gowa. Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 7).
- Hasibuan, W. H. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior* (Vol. 17).
- Numberi, C. L., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) (Study Empiris di Kabupaten Manokwari), *17*, 113–129. Retrieved from <https://Suaramandiri.co>
- Putri, a. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Allya Nadia Itra Ardana Putri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(7), 2023. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

- Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 22–33. Retrieved from <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma%0AANALISIS>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>